

Pendampingan Implementasi Merdeka Belajar di SD Gunungpring 1 dan 2 Muntilan Magelang

Implementation Assistance of Merdeka Belajar at SD Gunungpring 1 and 2, Muntilan, Magelang

¹Desi Nurhikmahyanti, ¹Suwito Singgih

¹Program Studi Pendidikan IPA, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Magelang

Korespondensi: D. Nurhikmahyanti, desinurhikmahyanti@untidar.ac.id

Naskah Diterima: 5 Februari 2024. Disetujui: 1 Agustus 2024. Disetujui Publikasi: 30 April 2025

Abstract. Enhancing the quality of human resources is the primary goal of the autonomous learning initiative supported by the Minister of Education and Culture. All participants in the schools, including State SD Gunungpring 1 and State SD Gunungpring 2, are learning that the concept of 'Merdeka' introduces something innovative. Based on a needs analysis conducted with community service partners, priority issues were identified, particularly management challenges related to the inadequacy of AKM (Minimum Competency Assessment) and PPDB (New Student Admission System) under the zoning system. One of the key challenges identified was the lack of teachers' knowledge in developing independent learning lesson plans (RPP) and employing teaching strategies relevant to the independent learning approach, as well as addressing learning difficulties faced by students. This highlights the need for a thorough understanding of the implementation of the independent learning policy among all stakeholders. State SD Gunungpring 1 and 2 are integrating the independent learning framework to address these policy-related challenges, enabling teachers to effectively implement AKM, manage zoned schools, develop RPPs, and adopt appropriate teaching strategies. The method applied in this community dedication program involved several stages: conducting a needs assessment with commitment partners, delivering lectures and facilitating discussions, preparing materials for accompaniment activities, implementing the accompaniment program, and conducting monitoring and evaluation to ensure the sustainability of the activities. The outcomes of this dedication program were positive. Based on teacher responses, 80% of the teachers successfully participated in the accompaniment sessions, and the program's success rate reached 80%. It was concluded that most teachers were able to effectively manage school administration, design, and prepare lesson plans.

Keywords: *Implementation, Freedom of Learning, Elementary School, Assistance.*

Abstrak. Program merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merdeka belajar menjadi hal baru bagi seluruh pelaku di sekolah termasuk SD Negeri Gunungpring 1 dan SD Negeri Gunungpring 2. Hasil analisis kebutuhan dengan mitra pengabdian masyarakat ditemukan permasalahan prioritas yaitu permasalahan manajemen meliputi ketidaksiapan AKM dan PPDB menggunakan sistem zonasi. Selain itu, permasalahan prioritas lainnya yaitu permasalahan pembelajaran mencakup kekurangpahaman guru dalam menyusun RPP merdeka belajar dan metode pengajaran yang relevan dengan merdeka belajar. Untuk itu perlu adanya pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar tersebut bagi seluruh stakeholder salah satunya melalui pendampingan. Pendampingan implementasi merdeka belajar dilaksanakan di SD Negeri Gunungpring 1 dan 2 yang memiliki permasalahan terkait kebijakan baru tersebut. Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan yakni guru di SD Negeri Gunungpring 1 dan 2 dapat mengimplementasi merdeka belajar dengan baik dalam melaksanakan AKM, menerapkan sekolah zonasi saat PPDB, menyusun RPP merdeka belajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang

tepat dalam merdeka belajar. Adapun metode pengabdian yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi dimulai dari menganalisis kebutuhan mitra pengabdian, penyusunan materi kegiatan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi keberlangsungan kegiatan pendampingan. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik berdasarkan hasil angket respon guru yang menunjukkan 80% guru dapat mengikuti pendampingan dan target pencapaian keberhasilan program mencapai 80% sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar guru dapat mengikuti pendampingan tentang manajemen sekolah, membuat dan menyusun rencana pembelajaran dengan sangat baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Merdeka Belajar, Sekolah Dasar, Pendampingan.*

Pendahuluan

Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa program merdeka belajar akan dijadikan pembelajaran yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia. Adanya program merdeka belajar diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Merdeka belajar adalah sebuah gagasan awal dalam rangka melakukan perbaikan terhadap Sistem Pendidikan Nasional agar dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Karena selama ini, tujuan pendidikan belum dapat tercapai secara maksimal. Program merdeka belajar menjadi suatu program yang dapat menciptakan suasana belajar tanpa adanya tekanan dan bahagia untuk guru dan peserta didik (Ruhaliyah, dkk, 2020).

Adanya merdeka belajar dilatar belakangi oleh banyaknya orang tua yang mengeluh dengan pemberlakuan Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini berlaku. Keluhan-keluhan tersebut diantaranya adalah adanya patokan nilai-nilai tertentu bagi peserta didik. Dengan demikian, program merdeka belajar adalah bentuk kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan memberlakukan kembali esensi dari penilaian yang senantiasa kian ditinggalkan. Munculnya merdeka belajar juga disebabkan oleh terjebaknya guru dan sekolah dalam mengurus administrasi pendidikan seperti akreditasi, nilai ujian, hingga ketentuan dalam birokrasi (Houtman, 2020). Di dalam merdeka belajar, kemampuan seseorang dapat menghasilkan ide-ide inovatif bukan hanya fungsi pikiran, tetapi juga fungsi perilaku. Apabila seseorang tersebut mengubah perilakunya, maka dapat meningkatkan dampak kreatifnya (Dyer, dkk, 2019).

Kebijakan merdeka belajar mencakup empat kebijakan pokok yang dicetuskan oleh Kemdikbud (2019) yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi harus memperoleh banyak perhatian dari berbagai pihak terkait seperti sekolah dan guru. Hal ini patut diperhatikan karena tiga kebijakan diantaranya adalah penyederhanaan RPP, AKM pada tahun 2023, dan metode pembelajarannya sangat berkorelasi dengan tugas dan fungsi guru. Sedangkan, satu kebijakan lainnya yaitu kebijakan mengenai zonasi PPDB bukanlah tugas guru melainkan termasuk dalam ranah manajemen sekolah.

Merdeka belajar menjadi hal baru bagi seluruh pelaku di sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Begitu pula dengan sekolah dasar yang terletak di Kabupaten Magelang tepatnya SD Negeri Gunungpring 1 dan SD Negeri Gunungpring 2. Hasil analisis kebutuhan dan wawancara dengan mitra pengabdian masyarakat ditemukan permasalahan prioritas yaitu permasalahan manajemen meliputi ketidaksiapan AKM dan PPDB menggunakan sistem zonasi. Selain itu, permasalahan prioritas lainnya yaitu permasalahan pembelajaran mencakup kekurangpahaman guru dalam menyusun RPP merdeka belajar dan metode pengajaran yang relevan dengan merdeka belajar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa AKM yang dilakukan di SD Gunungpring 1 dan 2 masih tergolong cukup baik. Sebab, peserta didik masih belum terbiasa dengan format asesmen yang baru dan kesiapan guru belum maksimal karena

pelatihan dan dukungan yang memadai tidak tersedia. Kemudian, zonasi PPDB memiliki tantangan tersendiri karena merupakan hal baru yang belum pernah diaplikasikan sebelumnya. Pemahaman filosofi dan pendekatan baru yang diperkenalkan oleh kurikulum Merdeka Belajar memerlukan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Hal ini belum terealisasi sehingga guru kesulitan dalam penyusunan RPP dan pengaplikasian metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar.

Permasalahan yang ditemukan di mitra pengabdian berkaitan dengan implementasi merdeka belajar di satuan pendidikan yang tidak mudah. Kebijakan merdeka belajar menciptakan paradigma baru tentang pendidikan, pembelajaran, serta peran guru. Hal ini dikemukakan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan bahwa tugas guru merupakan tugas yang mulia dan sulit (Yamin & Syahrir, 2020; Natalia & Sukraini, 2021). Penyebabnya adalah pelaksanaannya yang diharuskan berlangsung dengan rinci, teliti, sistematis, dan realistis sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, aplikasi merdeka belajar di satuan pendidikan diperlukan pelibatan seluruh pihak yang peduli dalam peningkatan kualitas pendidikan (organisasi kurikulum metode, media pembelajaran, komite sekolah, panitia PPDB, panitia AKM), sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ada di sekolah meliputi kualitas, jumlah, dan jenis, anggaran dana untuk pergerakan proses pendidikan, serta sumber daya manusia yang solid. Implementasi merdeka belajar yang tidak mudah dan masih awam juga dinyatakan oleh Widarti, dkk (2023) bahwa guru tidak mempunyai pengalaman mengajar dengan program merdeka belajar sehingga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, guru belum terbiasa mengajar di kelas dengan mengimplementasikan merdeka belajar.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan mitra tentu perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, tim pengabdian memberikan solusi dengan melakukan pendampingan terkait manajemen dan pembelajaran. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah guru di SD Negeri Gunungpring 1 dan 2 dapat mengimplementasi merdeka belajar dengan baik dalam melaksanakan AKM, menerapkan sekolah zonasi saat PPDB, menyusun RPP merdeka belajar, serta menerapkan metode pembelajaran yang tepat dalam merdeka belajar.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Gunungpring 1 yang beralamat di Jalan Wonosari Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan luas 3050 m². SD Negeri Gunungpring 1 memiliki akreditasi B dengan jumlah rombongan belajar 12 dengan sistem pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah. Tempat pelaksanaan kedua yaitu di SD Negeri Gunungpring 2 yang beralamat di Tlatah Ngasem Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan luas 1.696 m². SD Negeri Gunungpring 2 memiliki akreditasi A dengan jumlah rombongan 9 dengan sistem pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru SD Gunungpring 1 dengan total keseluruhan guru berjumlah 12 dan seluruh guru SD Gunungpring 2 dengan jumlah 11 guru. Sejumlah 32 guru tersebut terlibat secara langsung dalam pengimplementasian merdeka belajar di sekolah.

Metode Pengabdian. Metode yang dilaksanakan adalah ceramah dan diskusi yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan pembelajaran di kelas. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Melakukan dan menganalisis *need assesment*. Kegiatan ini dilaksanakan melalui wawancara kepada mitra pengabdian masyarakat yaitu SD Negeri Gunungpring 1 dan 2.
2. Menyusun hasil studi pendahuluan dan analisis *need assesment*. Kegiatan kedua ini dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan mitra pengabdian masyarakat

berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan.

3. Menyusun pelatihan dan pendampingan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tentang permasalahan dalam manajemen sekolah dan pembelajaran di kelas.
4. Melaksanakan pendampingan di SD Negeri Gunungpring 1 dan 2. Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pendampingan manajemen dan pendampingan terkait pembelajaran. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a) Pendampingan manajemen terdiri atas dua bagian yaitu pertama, pendampingan persiapan AKM. Pendampingan dilakukan dengan membangun kesadaran terhadap mitra tentang pentingnya mempersiapkan secara matang dalam implementasi AKM secara benar. Mitra telah didampingi bagaimana sekolah mempersiapkan AKM sebagai pengganti Ujian Nasional yang memang baru pertama kali diselenggarakan. Kedua, pendampingan untuk mempersiapkan zonasi PPDB. Pendampingan dilaksanakan dengan memberi penjelasan perbedaan PPDB sebelum adanya zonasi dan setelah adanya zonasi yang harus memperhatikan aturan PPDB. Aturan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Dikpora Kabupaten Magelang.
 - b) Pendampingan mengenai pembelajaran terdiri atas dua bagian yaitu pertama, pendampingan menyusun RPP yang sederhana sesuai yang diharapkan dalam pembelajaran merdeka belajar. Kedua, pendampingan menetapkan metode pembelajaran dalam merdeka belajar. Kegiatan ini dilakukan analisis terhadap materi pelajaran mana yang menggunakan metode pembelajaran tertentu dan media pembelajaran yang dipakai pendidik untuk melakukan transfer ilmu kepada peserta didik.
5. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dari kegiatan pendampingan yaitu kemampuan mitra meningkat mencapai 80% tentang persiapan implementasi AKM, persiapan zonasi PPDB, menyusun RPP merdeka belajar, dan menyusun metode pembelajaran merdeka belajar setelah pendampingan.

Metode Evaluasi. Kegiatan evaluasi pada pengabdian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan pemahaman peserta pelatihan. Pendekatan evaluasi dengan memberikan survei di tiap akhir pendampingan. Survei tersebut dilaksanakan dengan pengisian angket oleh guru yang hasilnya dapat menunjukkan perubahan perilaku guru sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Perubahan yang terlihat adalah adanya peningkatan pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka. Angket berisi berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan narasumber hingga relevansi materi yang disampaikan. Dengan demikian, pertemuan selanjutnya hingga pendampingan yang terakhir dapat terlaksana dengan baik.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama adalah pendampingan pertemuan pertama, tahap kedua yaitu pendampingan pertemuan kedua, dan tahap ketiga yaitu pendampingan pertemuan ketiga.

A. Pendampingan Pertemuan Pertama

Pelaksanaan PKM ini berlangsung tiga kali pertemuan di setiap sekolah. Kegiatan PKM dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei 2023 di SD N Gunungpring 1. Pelaksanaan PKM di SD N Gunungpring 2 dilaksanakan tanggal 29 Juli 2023. Pertemuan-pertemuan yang berlangsung memperoleh tanggapan positif dan antusiasme yang cukup baik. Di samping itu, kegiatan PKM berjalan sesuai rencana dan lancar hingga akhir kegiatan. Lokasi kegiatan PKM dilaksanakan di satu

ruangan kelas di SD N Gunungpring 1 dan 2. Jumlah guru yang ikut serta dalam kegiatan PKM di SD Negeri Gunungpring 1 berjumlah 9 orang dan SD Negeri Gunungpring 2 sejumlah 10 orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan saat seluruh guru tidak memiliki jam pelajaran sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas.

Serangkaian kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh tim PKM yang melibatkan mahasiswa yang masing – masing terdiri atas dua orang. Setiap anggota tim yang berjumlah dua orang memiliki kompetensi di bidangnya, begitu pula mahasiswa yang berkontribusi dalam teknis pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pelaksanaan pendampingan diawali dengan penyampaian materi pengantar persiapan sekolah dalam implementasi AKM tahun 2023. Tim PKM telah melakukan pendampingan dengan membangun kesadaran dan pendampingan terhadap mitra pentingnya mempersiapkan AKM tahun 2023 sebagai pengganti Ujian Nasional. Mitra telah didampingi bagaimana cara mempersiapkan AKM yang sebelumnya ujian nasional secara teknis mulai dari mempersiapkan guru, pembelajaran, sarana prasarana, keuangan dan siswa yang akan diujikan.

Pelaksanaan kegiatan PKM di SD Negeri Gunungpring 1 dilakukan pada tanggal 9 Mei 2023, sedangkan pelaksanaan pendampingan di SD Negeri Gunungpring 2 dimulai pada tanggal 27 Juli 2023. Kegiatan pendampingan dibuka oleh kepala sekolah di SD Negeri Gunungpring 1, yaitu Sugita, S.Pd. dan kegiatan pendampingan SD Negeri Gunungpring 2 dibuka oleh kepala sekolah, Endra Marseta, S.Pd. Materi selanjutnya yang disampaikan yaitu tentang zonasi PPDB dengan konsep merdeka belajar untuk sekolah dasar. Pendampingan mempersiapkan implementasi zonasi PPDB. Apabila tahun sebelumnya PPDB berdasarkan siswa yang mendaftar berdasarkan prestasi, kemampuan akademik dan minat siswa, tetapi PPDB dalam implementasi dari merdeka belajar berdasarkan zonasi yaitu jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Hal ini merupakan sistem yang baru bagi SD Negeri Gunungpring 1 dan 2 karena sebelumnya PPDB bersifat konvensional. Kebijakan sistem zonasi PPDB dimaksudkan untuk pemerataan mutu pendidikan dengan menjadikan semua sekolah memiliki fungsi, kedudukan, dan peran yang sama yaitu melayani peserta didik (Andina, 2017). Sistem PPDB ini mengharuskan setiap sekolah dibawah naungan pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang jarak rumah dengan sekolah sangat dekat dengan minimal 90% dari total seluruh siswa yang diterima (Perdana, 2019).

B. Pendampingan Pertemuan Kedua

Pertemuan ini berlangsung pada hari Rabu, 10 Mei 2023 di SD Negeri Gunungpring 1 dan hari Sabtu, 29 Juli 2023 di SD Negeri Gunungpring 2. Pada pertemuan ini dilakukan pendampingan tentang penyusunan RPP konsep merdeka belajar dan materi pendampingan selanjutnya yaitu tentang penyusunan model pembelajaran konsep merdeka belajar.

Pendampingan dalam menyusun RPP yang disederhanakan ini mencakup (1) RPP bertujuan untuk keefektifan, efisiensi, dan berorientasi kepada peserta didik atau *student centered*; (2) komponen yang termuat dalam RPP meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmen; dan (3) sekolah beserta pendidik bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di dalam sekolah. Sehingga, RPP Merdeka belajar ini diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan pembelajaran di sekolah sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu di kehidupan sehari-harinya berdasarkan materi yang telah dipelajari di sekolah.

Hal ini sejalan dengan Pendi (2020) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar dapat memotivasi peran guru untuk mengembangkan

kurikulum ataupun kegiatan pembelajaran. Guru menjadi salah satu sumber belajar dalam merdeka belajar yakni berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang tentunya ditopang oleh kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dengan dukungan kompetensi-kompetensi tersebut pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dapat terwujud.

Pendampingan guru untuk menyusun model dan metode pembelajaran. Guru diberikan kebebasan dalam pemilihan, pembuatan, penggunaan, dan pengembangan RPP berguna dalam menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di daerahnya, sebab tidak semua daerah memiliki kebutuhan yang sama. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai seorang pendidik, guru diketahui dapat memahami psikologi peserta didiknya serta mengetahui tentang metode dan strategi pembelajaran (Jaghav & Patankar, 2013). Guru yang paling mengetahui seperti apa kebutuhan peserta didik di daerahnya dan bagaimana perkembangan peserta didik sehingga rumusan RPP dibebaskan. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, RPP yang dibuat sederhana dan ringkas tidak membebani administrasi guru karena efektif dan efisien. Selama ini, guru cukup terbebani dengan administrasi yang kaku. Harapan adanya penyederhanaan RPP bagi guru membuat pembelajaran berlangsung interaktif, aktif, dinamis, dan tidak kaku dengan berbagai macam model pembelajaran. Guru masih belum terbiasa dan model yang digunakan dirasa kurang efektif. Hal inilah yang membuat guru mempunyai sudut pandang bahwa kurikulum merdeka sulit untuk diterapkan (Rusmiati dkk., 2023).

Selain menyusun RPP, guru juga berperan sangat penting baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam implementasinya. Begitu juga halnya dalam implementasi kebijakan merdeka belajar. Guru dapat memberikan kontribusinya secara kolaboratif dan efektif bekerja melalui pengembangan kurikulum sekolah yaitu menyusun materi, buku teks, maupun konten pembelajaran yang sesuai. Keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum ini sangat penting dilakukan dengan tujuan agar isi kurikulum menjadi selaras dengan kebutuhan peserta didik di kelas (Alsubaie, 2016).



Gambar 1. Pendampingan implementasi kurikulum merdeka

C. Pendampingan Pertemuan Ketiga

Kegiatan pendampingan ketiga dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di SD Negeri Gunungpring 1 dan tanggal 10 Agustus 2023 di SD Negeri Gunungpring 2. Materi kegiatan pertemuan terakhir ini adalah evaluasi dari pendampingan ini apakah ada kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan dari kegiatan pendampingan ini.

Monitoring dalam pengabdian ini terlaksana dengan cara mengetahui bagaimana sebuah kegiatan yang telah berjalan berhasil dengan maksimal. Proses evaluasi dilakukan dengan cara:

1. Mengetahui tanggapan dan antusiasme peserta pengabdian dalam membuat berbagai administrasi guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka.
2. Melakukan monitoring dalam setiap pendampingan dan aplikasinya telah sesuai dengan pedoman atau belum.
3. Memantau hasil kinerja guru dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka.

Sebagai bahan refleksi dan evaluasi, setiap akhir pendampingan dilakukan survei kembali untuk memberikan beberapa masukan dan arahan agar kegiatan berikutnya berjalan dengan lebih baik lagi. Berikut ini adalah tanggapan guru di SD Negeri Gunungpring 1 dan 2 setelah melaksanakan pendampingan terkait manajemen dan pembelajaran di era kurikulum merdeka.

Tabel 1. Respon guru setelah pendampingan

No.	Pertanyaan	SK	K	C	B	SB
1	Materi yang disampaikan sangat jelas, mudah dipahami, dan diikuti	0	0	0	9	10
2	Penyampaian materi relevan dengan tujuan pendampingan	0	0	0	2	17
3	Penyampaian materi interaktif dan komunikatif	0	0	1	2	15
4	Materi disajikan secara menarik	0	0	2	1	15
5	Penguasaan materi oleh narasumber	0	0	0	5	14
6	Kemampuan narasumber menjawab pertanyaan peserta	0	0	0	3	16
7	Pelaksanaan seluruh kegiatan pendampingan	0	0	1	9	9

Keterangan:

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

K : Kurang

SK : Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar guru dapat mengikuti pendampingan membuat dan menyusun manajemen dan pembelajaran dengan sangat baik. Berbagai kendala dalam pengabdian ini adalah jaringan atau sinyal internet yang terkadang kurang stabil serta penyesuaian waktu dalam merencanakan, menyusun, dan membuat perangkat kurikulum Merdeka dan menyusun metode pembelajaran. Dikarenakan Peserta pengabdian mempunyai kewajiban mengajar sehingga proses pembuatan dan penyusunan sedikit terkendala. Kendati demikian, kegiatan pengabdian di SD Negeri Gunungpring 1 dan SD Negeri Gunungpring 2 terlaksana sesuai dengan tujuan pengabdian dan berjalan dengan baik.

Kesimpulan

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini telah tercapai, yaitu dengan terlaksananya pendampingan kepada sekolah mengenai implementasi AKM dan sistem zonasi PPDB. Selain itu, pendampingan juga diberikan kepada guru dalam menyusun RPP berbasis Merdeka Belajar dan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan, sebagaimana hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar guru mampu mengikuti pendampingan terkait manajemen sekolah, serta dapat membuat dan menyusun rencana pembelajaran dengan sangat baik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada kepala semua pihak yang membantu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Alsubaie, M. A. (2016). Curriculum development: Teacher involvement in curriculum development. *Journal of Education and practice*, 7(9), 106-107.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095725.pdf>
- Andina, E. (2017). Sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. *Majalah info singkat kesejahteraan sosial*, 9(14), 9-12.
https://www.academia.edu/34227169/2017_14_Sistem_Zonasi_dan_Dampak_Psikososial_bagi_Peserta_Didik_pdf
- Dyer, J., Gregersen, H., & Christensen, C. M. (2019). *The Innovator's DNA, Updated, with a New Preface: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*. Harvard Business Press.
<https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=41229>
- Houtman, H. (2020). Merdeka Belajar Dalam Masyarakat 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/3785>
- Jaghav, M. S., & Patankar, P. S. (2013). Role teachers In Curriculum Development For Teacher Education. *National Confecence on Challenges in Teacher Education, Physical Education and Sports, Department of Education and Physical Education Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur*, 1-9.
https://www.academia.edu/27023615/Role_of_Teachers_in_Curriculum_Development_for_Teacher_Education
- Kemdikbud. (2019). *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar>
- Natalia, K., & Sukraini, N. (2021, May). Pendekatan konsep merdeka belajar dalam pendidikan era digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 22-34).
<https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/93>
- Pendi, Y. O. (2020, May). Merdeka belajar yang tercermin dalam kompetensi profesional guru bahasa inggris SMP Negeri 01 Sedayu. In *Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/%20semnas2020/article/view/7743>
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.
<https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/glasser/article/view/186>
- Ruhaliah, R., Sudaryat, Y., Isnendes, R., & Hendrayana, D. (2020). Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran “merdeka belajar” bagi guru bahasa Sunda di Kota Sukabumi. *Dimasatra*, 1(1).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/dimasatra/article/view/47504>
- Rusmiati, M. N., Ashifa, R., & Herlambang, Y. T. (2023). Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Naturalistic: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(2), 1490-1499.
<https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i2.2203>
- Widarti, H. R., Rokhim, D. A., & Syafruddin, A. B. (2023). Peningkatan pemahaman pelaku pendidikan mgmp kimia se-sidoarjo terhadap asesmen kompetensi minimum melalui penggunaan aplikasi Pintarin.id. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(4), 694-710.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/24289>
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal ilmiah mandala education*, 6(1).
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1121/0>

Penulis:

Desi Nurhikmahyanti, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Magelang. E-mail: desinurhikmahyanti@untidar.ac.id

Suwito Singgih, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Magelang. E-mail: suwitosinggih@untidar.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Nurhikmahyanti, D., & Singgih, S. (2025). Pendampingan Implementasi Merdeka Belajar di SD Gunungpring 1 dan 2 Muntilan Magelang. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(2), 273-281.